

Naskah Akademik Jabatan Fungsional

Analisis Kebijakan

Tim Penyusun:

Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MA

Dr. Erwan Agus Purwanto, MA

Agus Pramusinto, MDA, PhD

Dr. Ambar Widaningrum, MA

Septiana Dwiputrianti, PhD

Mid Rahmalia, SE, M.Si



Kerjasama
Lembaga Administrasi Negara
(National Institute of Public Administration)
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan
dan
Magister Administrasi Publik
(Institute of Governance and Public Affairs)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada

Jakarta-Yogyakarta, December, 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR.....	IV
BAB I PENGANTAR	1
1.1 Pendahuluan.	1
BAB II RELASI ANTARA PEMBUAT KEBIJAKAN DAN ANALIS KEBIJAKAN: SEBUAH KERANGKA TEORITIS	5
2.1 Kebijakan Publik	5
2.2 Analisis Kebijakan Publik	9
2.3 Peran Analisis Kebijakan	15
BAB III MATERI MUATAN: PERATURAN KEPALA LAN TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN	23
3.1 Level, Definisi dan Tugas Analisis Kebijakan	23
3.1.1 Level Analisis Kebijakan.....	23
3.1.2 Definisi Analisis Kebijakan.....	24
3.1.3 Tugas Analisis Kebijakan	24
3.2 Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan yang dibutuhkan	28
3.2.1 Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan yang dibutuhkan JFAK secara umum.....	28

3.2.2 Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan yang dibutuhkan JFAK secara khusus	31
3.3 Produk Analisis Kebijakan dan Isi Produk Analisis Kebijakan	42
3.3.1 Produk Analisis Kebijakan Utama.....	42
3.3.2 Produk Analisis Kebijakan Penunjang	53
3.4. Penilaian Angka Kredit.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Analisis Kebijakan menurut Dunn.....	12
Tabel 1.2 Produk Analisis Kebijakan Publik menurut Beckman.....	14
Tabel 3.1 Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK).....	23
Tabel 3.2 Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan JFAK Pertama.....	31
Tabel 3.3 Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan JFAK Muda.....	34
Tabel 3.4 Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan JFAK Madya.....	36
Tabel 3.5 Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan JFAK Utama	39
Tabel 3.6 Produk Analisis Kebijakan Pertama	42
Tabel 3.7 Produk Analisis Kebijakan Muda	44
Tabel 3.8 Produk Analisis Kebijakan Madya	47
Tabel 3.9 Produk Analisis Kebijakan Utama.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antara Policy Maker dengan Analis Kebijakan dalam menghasilkan informasi kebijakan	10
Gambar 1.2 Peran Analis Kebijakan dalam merubah riset ilmiah menjadi informasi kebijakan.....	11

BAB I

PENGANTAR

1.1 Pendahuluan.

Kualitas kebijakan publik di Indonesia sangat buruk. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya produk kebijakan yang kontraproduktif dengan keinginan publik, dan kemudian harus mendapatkan pembatalan, baik oleh pemerintah pusat, maupun Mahkamah Konstitusi. Untuk kebijakan yang berupa Peraturan Daerah (Perda), sejak tahun 2002-2011, dari sekitar 13.000, terdapat 4.000 buah yang ditolak oleh pemerintah pusat karena bertentangan dengan UU/10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Banyak Perda yang ditolak itu karena tidak mengakomodir kepentingan masyarakat.¹ Sementara itu, untuk kebijakan publik berupa Undang-undang, sejak tahun 2003-2013 terdapat 807 buah yang di-*judicial review*. Dari 807 buah UU itu, 127 buah yang pengujiannya dikabulkan.²

Kualitas kebijakan publik yang sangat buruk itu, berbanding terbalik dengan anggaran yang dikeluarkan. Anggaran untuk pembuatan kebijakan publik, baik di level daerah, kabupaten/kota dan provinsi, maupun di pusat membutuhkan biaya yang sangat besar. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, anggaran yang

¹ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum>

² <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

dibutuhkan untuk membuat satu Perda tahun 2012 sebesar Rp 400 juta dan meningkat menjadi Rp 500 juta tahun 2013.³ Selanjutnya, hasil survei Perhimpunan Pembentuk Peraturan Daerah Indonesia (Perda Indonesia) menemukan bahwa di 571 kabupaten, 103 kota, dan 33 provinsi, total biaya pembuatan perda antara Rp300 juta hingga Rp2 miliar.⁴ Jika diasumsikan rata-rata pembuatan sebuah Perda sebesar Rp 300 juta, maka pemborosan anggaran pada tahun 2002-2011 adalah Rp 1,2 triliun. Anggaran biaya untuk pembuatan UU, meskipun jumlahnya lebih kecil daripada Perda, jauh lebih mahal dibandingkan dengan pembuatan Perda. Untuk tahun 2011 misalnya, anggaran pembuatan satu UU sebesar Rp 1,8 milyar dan kemudian melonjak menjadi Rp 5,2 milyar di tahun 2012.⁵ Jika misalnya kita menggunakan data UU yang dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2013 yang sebanyak 127 itu, dengan rata-rata biaya pembuatan UU sebesar Rp 2 milyar, maka pemborosan anggarannya Rp 254 milyar.

Fakta di atas baru pada Perda dan UU yang mengalami masalah dan mendapatkan pembatalan, baik secara keseluruhan, maupun per bab atau pasal. Itu bukan berarti Perda atau UU yang tidak dibatalkan atau di-*judicial review* tidak mengalami banyak masalah. Permasalahan itu tidak saja pada produk kebijakan berupa Perda dan UU, melainkan pada produk kebijakan lainnya seperti Perpu, PP, Perpres, Keppres, Pergub, Perbup, Perwa, Permen, Kepmen, Surat Edaran, program,

³ <http://www.tempo.co/read/news/2012>

⁴ <http://www.jurnas.com/news/32485>

⁵ <http://hukumonline.com>

dan lainnya. Jika ini semua diakumulasi, maka pemborosan anggaran pembuatan kebijakan publik dapat mencapai angka triliunan rupiah setiap tahunnya.

Buruknya kualitas kebijakan publik selama ini, karena para *policy maker* ketika membuat satu kebijakan tidak didukung oleh analisis kebijakan. Padahal peran analisis kebijakan sangat penting dalam memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas. Selama ini ada anggapan bahwa pembuatan kebijakan publik tergantung pada siapa yang mengagendakannya (*agenda setter*). *Policy maker* dianggap sebagai orang yang paling tahu apa kriteria dan alternatif kebijakan yang tepat untuk mengatasi satu permasalahan publik. Padahal tugas itu seharusnya dilakukan oleh seorang yang berprofesi khusus, yaitu analisis kebijakan. Seorang analisis kebijakan memang dikhususkan untuk menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan tentang analisis kebijakan untuk melaksanakan tugas merumuskan masalah, melakukan peramalan, merumuskan rekomendasi, melaksanakan pemantauan, dan menyusun evaluasi kebijakan. Pekerjaan antara *policy maker* dan analisis kebijakan itu memang sangat berbeda. Lebih khusus, analisis kebijakan melakukan pekerjaan antara lain:

1. Analisis kebijakan harus memilih klien yang menerima pekerjaan mereka;
2. Analisis kebijakan harus memahami klien dan mengetahui kebutuhan tiap klien.
3. Analisis kebijakan harus memiliki akses ke pembuat kebijakan.;
4. Analisis kebijakan harus memiliki otonomi;
5. Analisis kebijakan harus adaptif terhadap hierarki organisasi;
6. Analisis kebijakan harus memiliki akses informasi dan data;
7. Analisis kebijakan harus berorientasi pada tindakan (Viteritti, JP, 1982 pp. 466).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peran analisis kebijakan di Indonesia sudah sangat mendesak. Apalagi setiap tahun, pemerintah sendiri atau bersama-sama dengan DPR/DPRD menghasilkan ribuan kebijakan, yaitu undang-undang, perda provinsi, perda kabupaten dan berbagai bentuk produk turunannya seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen, surat edaran dan lain-lain. Di level daerah, produk-produk turunan kebijakan tersebut dapat berupa peraturan gubernur,

peraturan bupati, dan lain-lain. Selain kebijakan yang bersifat regulatif, tiap tahun pemerintah juga merancang ribuan kebijakan yang bersifat distributif yang berujud program-program pembangunan yang dilakukan oleh kementrian/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD).

BAB II

RELASI ANTARA PEMBUAT KEBIJAKAN DAN ANALIS

KEBIJAKAN: SEBUAH KERANGKA TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

Dari segi kepastakaan, kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa inggris. Policy dapat diartikan sebagai sebagai sebuah kegiatan yang diadopsi oleh pemerintah atau partai politik yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai pernyataan tertulis (Hornby, 1995). Namun, secara umum pengertian kebijakan publik dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama menekankan pada fungsi kebijakan publik sebagai tindakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kelompok kedua menekankan pada aktor yang membuat kebijakan tersebut. Untuk memperoleh kejelasan pada pengertian kebijakan, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat para ilmuwan yang merumuskan istilah kebijakan. Menurut Friedrich (2007) kebijakan adalah keputusan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sejalan dengan Friedrich, Sharkansky (1970) mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sementara Howlett dan Ramesh (2003) berpendapat bahwa kebijakan adalah keputusan pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pendapat Howlett dan Ramesh, Friedrich, Edwards dan Sharsansky

menekankan fungsi kebijakan publik sebagai instrumen suatu entitas untuk mencapai tujuan.

Kelompok kedua yang menekankan makna kebijakan pada aktor si pembuat kebijakan tersebut, menjelaskan pentingnya kontribusi policy maker dalam membuat kebijakan. Lester dan Stewart (1996) mengartikan kebijakan sebagai proses atau rangkaian kegiatan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik. Peterson (xxx) mendefinisikan kebijakan sebagai aksi pemerintah. Sepadan dengan Peters dan Pierre (2003) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah hasil dari tindakan pemerintah untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, Anderson (1979) yang mampu meningkatkan pemaknaan kebijakan publik dengan mendefinisikannya sebagai kebijakan yang dibuat dan dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Di dalam definisi ini, Anderson menekankan pentingnya peranan kolaborasi beberapa aktor dalam membuat kebijakan. Artinya, *policy maker* bukanlah aktor tunggal dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, proses dalam menghasilkan kebijakan publik itu tidak bermakna sempit karena tidak menyederhanakan kompleksitas pembuatan kebijakan pada kondisi yang riil. Seperti yang diyakini oleh Kay (2011), kebijakan publik didapatkan dari proses yang cukup rumit, mengingat bahwa terdapat beragam keputusan yang dihasilkan oleh beberapa aktor yang tersebar di seluruh organisasi pemerintah dalam tingkatan yang berbeda.

Kebijakan publik memiliki peranan yang sangat penting, karena penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dilakukan melalui kebijakan publik. Seperti yang diungkapkan oleh Howlett dan Ramesh, Friedrich dan Sharsansky bahwa fungsi kebijakan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Baiknya kinerja pemerintah hanya akan tercipta jika terdapat kebijakan yang baik (*good policy*). Sedangkan, kebijakan yang baik hanya akan didapatkan melalui proses

kebijakan yang baik pula (*good policy process*). Proses kebijakan melibatkan berbagai kegiatan yang kompleks. Proses kebijakan merupakan suatu siklus atau tahapan dari serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk membuat kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian proses yang bergerak dari satu tahapan ke tahapan yang lain secara berkesinambungan dan memiliki ketergantungan antar satu sama lain. Pemahaman terhadap proses pembuatan kebijakan oleh para ahli dipahami sebagai upaya penting dalam melakukan penilaian terhadap sebuah kebijakan publik.

Pada umumnya, tahapan proses kebijakan dimulai dari tahap penyusunan agenda, formulasi alternatif, adopsi/legitimasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Walaupun, para pakar kebijakan memberikan tahapan dan istilah yang berbeda-beda. Dunn (1981) membagi proses kebijakan menjadi empat tahapan kebijakan. Tahapan pertama adalah penyusunan agenda, yakni suatu fase untuk mengidentifikasi permasalahan publik. Tahapan yang kedua adalah formulasi kebijakan. Fase ini mulai mendiskusikan pilihan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan publik yang telah teridentifikasi. Tahapan yang ketiga, adopsi/legitimasi kebijakan. Pada tahapan ini kebijakan mulai dilaksanakan, dengan demikian kebijakan telah diberi otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tahapan keempat adalah penilaian/evaluasi kebijakan. Pada tahap terakhir ini, kebijakan akan dinilai baik dari segi substansi, proses implementasi dan derajat dampaknya. Kemudian, Ripley (1985) membagi proses kebijakan menjadi lima tahap. Tahap pertama adalah penyusunan agenda. Masalah yang ada dalam masyarakat mulai muncul melalui berbagai macam cara dan sarana yang kemudian menjadi perhatian pemerintah. Hasil pengamatan ini kemudian masalah dijadikan agenda pemerintah. Tahap kedua adalah Formulasi dan legitimasi. Pada tahap ini informasi dikumpulkan, dianalisis dan disebarluaskan.

Alternatif yang akan ditempuh untuk memecahkan masalah mulai dikembangkan, demikian juga usaha-usaha untuk mencari dukungan dari masyarakat melalui media massa dan organisasi sosial politik. Tahap ketiga adalah implementasi. Pada tahap ini dilakukan pengalokasian sumberdaya guna mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap keempat adalah Evaluasi. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan terutama yang berkaitan dengan hasil dan dampaknya. Tahap kelima adalah Penilaian. Pada tahap ini akan ditentukan apakah kebijakan atau program dimaksud dilanjutkan sebagaimana adanya, dilanjutkan dengan berbagai perbaikan di sana-sini guna memenuhi keinginan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, atau apakah kebijakan itu dibatalkan (*terminated*). Belajar dari tiga puluh tahun perkembangan studi kebijakan, kemudian Lester dan Stewart (2000) mengidentifikasi enam tahapan kebijakan yang mereka sebut sebagai siklus kebijakan. Siklus dimaksud adalah (1) *agenda setting*, penyusunan agenda, (2) *policy formulation*, formulasi kebijakan, atau *policy adoption*, adopsi kebijakan, (3) *policy implementation*, implementasi kebijakan, (4) *policy evaluation*, evaluasi kebijakan, (5) *policy change*, perubahan kebijakan, dan (6) *policy termination*, penundaan kebijakan.

Walaupun setiap ilmuwan memiliki istilah dan tahapan yang berbeda, namun secara umum, model proses kebijakan merupakan siklus yang bermula dari formulasi kebijakan menuju implementasi untuk mencapai kinerja kebijakan. Siklus demikian dimaksudkan agar sebuah kebijakan dapat diputuskan secara rasional. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan suatu kebijakan dibutuhkan bukti empiris dan penilaian yang strategis. Secara spesifik, di dalam tahapan pembuatan kebijakan terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab, antara lain, (i) apa masalah kebijakan; (ii) apa hasil-hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan di masa depan; (iii) apa pilihan

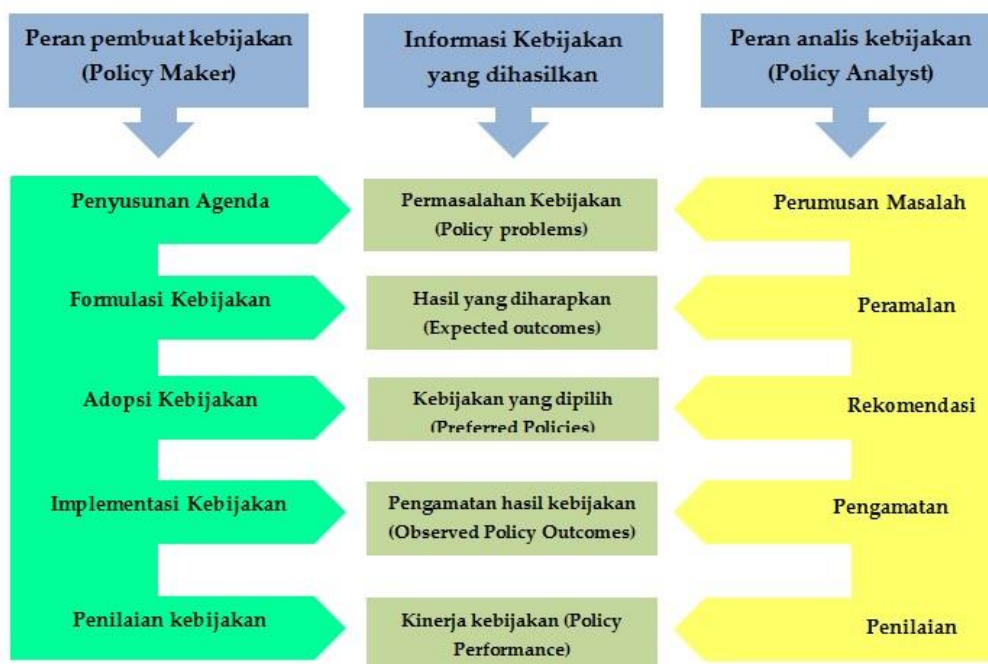
kebijakan yang paling ideal untuk menghasilkan hasil kebijakan yang diharapkan tersebut; (iv) apa hasil kebijakan yang didapat setelah diimplementasikan; (v) bagaimana kinerja suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang dirumuskan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat dipahami bahwa dalam tahapan pembuatan kebijakan membutuhkan analisis kebijakan.

2.2 Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan adalah penelitian sosial terapan yang bertujuan untuk membuat kebijakan. Analisis diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan yang mencakup informasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaikan serta dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan (Dunn, 2004). Analisis juga diperlukan dalam menilai kebijakan sebagai output proses kebijakan. Secara sistematis, analisis kebijakan diterapkan dalam lima prosedur, yaitu pertama, perumusan masalah yang menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan, yang kemudian berguna bagi *policy maker* untuk menyusun agenda kebijakan (*agenda setting*). Kedua, peramalan, yaitu yang menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Metodologi kedua ini berguna bagi *policy maker* dalam menyusun formulasi kebijakan. Ketiga, rekomendasi, yaitu menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah. Bagi *policy maker* hal ini dimanfaatkan untuk mengadopsi salah satu alternatif kebijakan yang ditawarkan. Keempat, pemantauan, yaitu menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Dalam konteks ini, *policy maker* mengimplementasikan alternatif kebijakan terpilih. Kelima, evaluasi, yaitu

menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah. Pada bagian akhir ini, *policy maker* melakukan penilaian kebijakan yang sudah diimplementasikan. Relasi kelima prosedur analisis kebijakan dalam menghasilkan informasi kebijakan dan *policy maker*, dapat dilihat dalam gambar 1 berikut ini.

Gambar 1.1 Hubungan Antara Policy Maker dengan Analisis Kebijakan dalam menghasilkan informasi kebijakan



Sumber : Diadaptasi dari Dunn (2004)

Merujuk pada gambar di atas dapat dikatakan bahwa analisis kebijakan merupakan penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang analis kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan (*policy information*) untuk selanjutnya digunakan membantu merumuskan suatu persoalan publik yang rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur (*well-structured policy problem*) sehingga memudahkan dalam merumuskan dan memilih berbagai alternatif

kebijakan (*policy alternatives*) yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan untuk direkomendasikan kepada *policy maker*. Hal ini dapat dilihat sebagai tampak pada gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2 Peran Analisis Kebijakan dalam merubah riset ilmiah menjadi informasi kebijakan



Sumber: Dielaborasi dari Dunn (2004)

Salah satu dari implikasi pentingnya pengembangan perspektif rasional dalam proses analisis kebijakan, yaitu munculnya peran analisis kebijakan. Walaupun seorang analisis kebijakan tidak memegang peran sebagai *policy maker* tetapi mereka bertanggungjawab dalam menentukan kualitas sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan seorang analisis kebijakan bertugas untuk membuat, menilai secara kritis hingga mengkomunikasikan informasi-informasi kebijakan yang terkait kepada *policy maker* (pembuat kebijakan). Media yang digunakan oleh analisis kebijakan untuk dapat mengkomunikasikan informasi kebijakan ini dapat berbentuk memo kebijakan (*policy memo*), makalah isu kebijakan (*policy issue papers*), ringkasan eksekutif (*executive summaries*), lampiran, dan rilis berita (*news release*) (Dunn, 2004).

Tabel 1.1 Produk Analisis Kebijakan menurut Dunn

No		<i>Policy memo</i>	<i>Policy issue papers</i>	<i>Executive summaries</i>	<i>Appendix</i>	<i>News release</i>
1	Substansi	Deskripsi singkat mengenai substansi, rangkuman dan rekomendasi kebijakan yang terdapat dalam makalah permasalahan kebijakan (<i>policy issue papers</i>).	Rangkuman jawaban dari berbagai pertanyaan, antara lain: 1) cara dalam memformulasikan permasalahan kebijakan; 2) lingkup dan tingkat krisis dari permasalahan kebijakan; 3) menghitung kegentingan sebuah permasalahan kaitannya dengan gerakan public action; 4) peramalan keadaan di masa depan apabila kebijakan tidak dibuat; 5) penelusuran apakah badan pemerintahan yang lain telah mengatasi permasalahan yang sedang dikerjakan atau tidak; 6) penetapan tujuan dan sasaran kebijakan; 7) pembuatan alternatif kebijakan; 8) penetapan kriteria dalam mengevaluasi setiap alternatif kebijakan; 9) penyusunan rekomendasi kebijakan; 10) penetapan badan pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan dan; 11) perumusan cara dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan.	Sipnosis dari unsur-unsur utama dalam makalah permasalahan kebijakan (<i>policy issue papers</i>) yang berisi: Tujuan dari penyusunan <i>policy issue papers</i> ; Latar belakang permasalahan atau pertanyaan penelitian; Temuan utama dalam penelitian; Pendekatan yang digunakan dalam metodologi penelitian dan analisis data Kesimpulan dan rekomendasi	Lampiran yang berisi informasi kuantitatif dan kualitatif	Rangkuman dari kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang terdapat dalam makalah permasalahan kebijakan (<i>policy issue papers</i>).

			Penyajian laporan ini perlu menambahkan tabel dan gambar, lampiran teknis yang menjelaskan hasil analisis data, UU dan RUU, deskripsi formula dan persamaan serta bahan penunjang lainnya.			
2	Panjang halaman	halaman	> 25 halaman	-	-	-

Sumber: Dunn, 2004

Beckman (1975), sebelumnya juga mengemukakan hal yang hampir sama terkait produk dari seorang analis kebijakan. Menurutnya, jembatan komunikasi antara policy maker dan analis kebijakan dalam menyalurkan informasi kebijakan adalah makalah kebijakan (*policy paper*). Menurut Beckman, makalah kebijakan adalah dokumen hasil analisis kebijakan. Sebuah *policy paper* dapat merekam atau mengkomunikasikan analisis kebijakan kepada pembuat kebijakan atau stakeholders yang lain. Dengan demikian, makalah kebijakan memiliki makna sebagai mode komunikasi atau instrumen yang digunakan analis kebijakan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. Beckman (Ukeles, 1977) menjelaskan bahwa makalah kebijakan terbagi menjadi tiga bentuk yakni *policy study*, *policy brief* dan *policy memo*. Tiap bentuk memiliki karakter yang berbeda dilihat dari perbedaan pada aspek pembaca, fokus masalah, konteks penggunaan dan metodologi. Pada tabel di bawah ini, akan terlihat perbedaan pada masing-masing makalah kebijakan:

Tabel 1.2 Produk Analisis Kebijakan Publik menurut Beckman

Tipe makalah kebijakan →			
Aspek Perbedaan ↓	<i>Policy Study</i>	<i>Policy Brief</i>	<i>Policy Memo</i>
Pembaca	Ahli kebijakan	Pembuat kebijakan	Stakeholders pada kebijakan terkait
Fokus Masalah	<i>Issue-driven:</i> Rekomendasi kebijakan umum dan analisis atas isu-isu kebijakan	<i>Audience driven:</i> pesan kebijakan yang spesifik digunakan untuk meyakinkan <i>stakeholders</i> .	<i>Audience driven:</i> pesan kebijakan yang spesifik digunakan untuk meyakinkan <i>stakeholders</i> .
Konteks Penggunaan	Digunakan untuk diseminasi dan debat mengenai hasil penelitian kebijakan. Selain itu juga digunakan untuk memberikan informasi dalam pembuatan <i>policy brief</i>	Digunakan untuk kegiatan advokasi dan lobi	Digunakan untuk kegiatan advokasi dan lobi agar para <i>stakeholders</i> mau mengetahui persoalan kebijakan secara lebih baik (misalnya membaca <i>policy brief</i>)
Metodologi	Secara umum menggunakan penelitian. Selain itu juga melakukan kajian sistematis mengenai sifat, sebab serta alternatif kebijakan publik.	Jarang menggunakan penelitian. Meneliti satu kebijakan, mengomparasikan dua atau lebih kebijakan serta memprediksi implikasi dari perubahan kebijakan dan alternatif tiap kebijakan.	Jarang menggunakan penelitian. Fokus pada rekomendasi kebijakan
Linguistik	Teknis dan sangat spesifik	Jelas dan sederhana	Jelas dan sederhana
Panjang Halaman	Sampai 60 halaman	Antara 6 sampai 15 halaman	Sampai 4 halaman

Sumber: Ukuleles (1977)

Pada perspektif yang lebih luas, seorang analis kebijakan bekerja dalam sebuah lingkungan (konteks) yang bersifat lokal, nasional dan global. Interaksi antara *policy maker*, *stakeholders*, tindakan kebijakan, dan lingkungan yang menjadi konteks di mana kebijakan diimplementasikan disebut sebagai sebuah sistem kebijakan. Seorang analis kebijakan harus mampu memahami dalam sistem kebijakan yang mana dia bekerja sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk

merespon masalah kebijakan yang dipecahkannya. Melalui makalah kebijakan, maka seorang analis kebijakan dapat berinteraksi secara formal dengan *policy maker* dalam bingkai proses analisis kebijakan. Produk analis kebijakan yang diberikan pada tahap prosedur pembuatan kebijakan ini sangat membantu dalam mengorganisir analisis sebuah kebijakan. Melalui produk analis kebijakan inilah seorang analis kebijakan memiliki peluang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan (Rich, 2004).

2.3 Peran Analis Kebijakan

Proses analisis kebijakan merupakan proses interaksi antara aktor di dalam lembaga pemerintah. Berangkat pada definisi Anderson (1979) dan Kay (2011) bahwa kebijakan merupakan hasil dari kolaborasi beberapa aktor di lembaga pemerintah, maka penting untuk memahami kedudukan dan peran analis kebijakan di dalam proses analisis kebijakan tersebut. E.S. Quade (1975) sebagaimana dikutip Dunn (2004) merumuskan bahwa analisis kebijakan merupakan:

Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa, sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan..... Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum; termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahnya ke dalam sejumlah komponen-komponen tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa

analisis kebijakan bersifat informal, meliputi tidak lebih dari proses berfikir yang keras dan cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan penghitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis yang canggih.

Definisi Quade ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai seorang analis kebijakan bersifat berjenjang, dari mulai identifikasi permasalahan, pembuatan alternatif dan rekomendasi kebijakan menggunakan data empiris dan metode penelitian yang menggunakan alat uji kuantitatif serta kualitatif, pengawasan implementasi kebijakan hingga proses evaluasi kebijakan. Terkait dengan metode penelitian, prosedur analisis kebijakan membedakan antara metodologi, metode, dan teknik. Metodologi analisis kebijakan menggabungkan standar, aturan dan prosedur. Akan tetapi, standar dan aturanlah yang menuntun seleksi dan penggunaan prosedur dan penilaian kritis terhadap hasilnya. Dengan demikian, prosedur merupakan subordinat dari standar plausibilitas dan relevansi kebijakan, dan terhadap tuntutan umum atau aturan multiplisme kritis. Peranan prosedur adalah untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan. Dapat dikatakan bahwa analisis kebijakan berupaya memberikan kejelasan mengenai kedudukan suatu permasalahan dengan mengedepankan proses yang runtut dan sistematis sehingga dapat tercipta kebijakan yang baik.

Terkait dengan tahapan prosedur analisis kebijakan, terdapat penjenjangan jabatan analis kebijakan publik pada tiap tahapan. Meltsner (1976) menyatakan bahwa, penentuan penjenjangan dalam jabatan analis kebijakan publik dibuat berdasarkan pada perbedaan target kerja. Perbedaan target kerja ini ditentukan oleh kedalaman kualitas pengetahuan, keterampilan serta kemampuan. Lebih lanjut

menurut Meltsner, penjenjangan pada jabatan analis kebijakan publik ini, menempatkan analis kebijakan tingkat paling bawah, sebagai person yang tidak memiliki otoritas untuk membuat strategi kebijakan. Hal ini dikarenakan analis kebijakan pada level bawah tidak memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menyusun strategi kebijakan. Sedangkan analis kebijakan publik di level atas memiliki tugas untuk menyusun strategi kebijakan serta memilah kebijakan publik berdasarkan sifat kegentingannya. Seorang analis kebijakan publik senior harus mampu berpikir dan bekerja strategis dalam situasi krisis terutama karena pemerintah pada masa sekarang berada pada lingkungan dimana proses pembuatan kebijakan tidak lagi menangani isu-isu yang rutin dan pasti. Kemampuan analis kebijakan publik senior ini tentunya dikarenakan kemampuan dalam memahami area kebijakan serta lingkungan politik dan institusional serta tekanan yang datang dari keduanya (Meltsner, 1972). Pendapat Meltsner ini sejalan dengan argumen Forester (1993) yang juga menekankan pentingnya analis kebijakan publik untuk mampu mengenali konfigurasi politik, sebab substansi kebijakan publik tidak bisa lepas dari pertarungan aktor-aktor politik. Dengan demikian, analis kebijakan publik di level atas dituntut untuk dapat berpikir strategis dalam menyusun strategi kebijakan dengan mempertimbangkan lingkungan politik nasional dan global.

Dalam menunjang fungsinya tersebut, seorang analis kebijakan harus mampu melakukan penelitian mandiri terutama yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan dan merumuskan intisari dari informasi yang kompleks. Informasi yang dibutuhkan dalam proses perumusan kebijakan adalah: (i) apa masalah kebijakan; (ii) apa hasil-hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan di masa depan; (iii) apa pilihan kebijakan yang paling ideal untuk menghasilkan hasil kebijakan yang diharapkan tersebut; (iv) apa hasil kebijakan yang didapat setelah diimplementasikan; (v)

bagaimana kinerja suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang dirumuskan. Untuk dapat menghasilkan informasi kebijakan tersebut tugas analisis kebijakan adalah: (i) merumuskan masalah; (ii) membuat forecasting; (iii) memberikan rekomendasi; (iv) melakukan monitoring, dan (v) melakukan evaluasi. Sedangkan untuk dapat menjalankan perannya dengan baik maka seorang analis kebijakan perlu memiliki keahlian dalam bidang: (i) metodologi analisis kebijakan; (ii) kemampuan analisis dan menyajikan data; (iii) teknik penulisan; (iv) teknik menyampaikan presentasi; (v) teknik advokasi kebijakan; (vi) teknik networking; (vii) teknik menyusun strategi kebijakan, dan (viii) substansi kebijakan. Karena kebijakan bersifat dinamis, untuk menjamin keberhasilan pilihan sebuah tindakan kebijakan yang direkomendasikan kepada *policy maker*, maka analis kebijakan perlu merumuskan strategi kebijakan yang berbeda-beda. Kompleksitas tugas yang harus dilakukan oleh seorang analis kebijakan membuat seorang analis kebijakan melakukan pekerjaan rutin dan pekerjaan kreatif.

Sayangnya, di Indonesia peran analis kebijakan ini belum disentuh sama sekali. Dalam proses pembuatan kebijakan, seorang *policy maker* biasanya menyusun agenda kebijakan berdasarkan apa yang menurut mereka penting. Kemudian untuk menganalisisnya, *policy maker* mengandalkan para staf ahli, staf administratif atau mereka yang berada pada jabatan struktural yang lebih rendah. Padahal kebanyakan diantara mereka ini tidak memiliki kualifikasi dalam penguasaan bidang analisis kebijakan publik. Akibatnya, sering terjadi satu kebijakan yang telah diimplementasikan, meskipun dilakukan sesuai aturan, ternyata gagal dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Hal ini yang oleh Raiffa disebut sebagai kesalahan tipe III (Dunn, 2004). Satu kebijakan, meskipun diimplementasikan dengan

baik, manakala masalahnya dirumuskan secara salah, akan memberikan hasil yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Di Indonesia, seorang *policy maker* pun pada kenyataannya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan analisis kebijakan. Kebanyakan diantara mereka tidak mampu untuk membuat kebijakan publik yang strategis, apalagi mereka yang berada pada jabatan politis, seperti bupati, walikota, gubernur, menteri, dan presiden. Hal yang sama terjadi pada diri seorang anggota DPR, DPD dan DPRD. Karenanya, tidak heran apabila kebijakan yang mereka hasilkan pada umumnya bias elit dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Agar kebijakan yang mereka hasilkan menjadi lebih baik, kebutuhan akan analis kebijakan menjadi keniscayaan. Seorang analis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan publik harus ditempatkan dalam jabatan fungsional.

Hal yang berbeda terjadi di belahan negara lain. Di beberapa negara, analis kebijakan memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses pembuatan kebijakan. Misalnya, di Amerika Serikat, seorang analis kebijakan bertanggungjawab untuk memberikan rekomendasi dan nasihat kepada para *policy maker* dalam berbagai level. Agar dapat menjadi seorang analis kebijakan, person tersebut diharuskan memiliki pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan kemampuan (*ability*) khusus seperti:

1. Pengetahuan yang mendalam mengenai suatu bidang atau beberapa bidang yang sesuai dengan kebutuhan kerja
2. Pengetahuan tentang isu-isu kebijakan publik yang terkait dengan bidang kerja
3. Pengetahuan tentang pengambilan keputusan di level eksekutif dan legislatif
4. Pengetahuan tentang penelitian dan metodologi penelitian
5. Pengetahuan tentang program kerja dan aktivitas organisasi yang terkait dengan bidang kerja
6. Keterampilan dalam berurusan dengan pembuat keputusan
7. Keterampilan dalam berinteraksi dengan para ahli pada bidang yang sama atau beberapa bidang yang terkait dengan bidang kerja
8. Keterampilan dalam menangani informasi secara efektif
9. Keterampilan dalam menyusun dan menyajikan materi yang sangat kompleks dan teknis untuk pihak awam

10. Keterampilan dalam menilai lingkungan politik dan kelembagaan dimana kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan
11. Kemampuan untuk mengeksplorasi dan menyajikan banyak segi dalam isu kebijakan
12. Kemampuan untuk melakukan penilaian dalam semua tahapan analisis – mulai dari memilah masalah, menyaring bukti empiris serta pemilihan opsi kebijakan yang paling layak
13. Kemampuan untuk secara efektif mengekspresikan ide-ide secara lisan dan tertulis, dengan menggunakan bahasa yang sesuai; mengorganisir ide-ide dan memilah fakta secara objektif
14. Kemampuan untuk bekerja secara efektif di bawah tekanan waktu (U.S. Office of Personnel Management, 1981: 6-7)

Di New Zealand, analis kebijakan berperan dalam memberikan rekomendasi dan saran kepada pembuat kebijakan (*policy maker*). Seorang analis kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan para *policy maker* dapat membuat kebijakan publik yang strategis. Secara umum tugas dari analis kebijakan publik adalah mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk membantu perencanaan, pengembangan, interpretasi serta peninjauan kebijakan publik⁶. Namun, secara rinci, seorang analis kebijakan publik yang bekerja di pemerintah New Zealand, memiliki rangkaian tugas, antara lain:

1. Mengidentifikasi dan menganalisa isu-isu kebijakan public
2. Melakukan penelitian untuk mengumpulkan data
3. Menafsirkan dan meninjau kebijakan publik yang dilaksanakan
4. Melakukan interaksi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dengan kebijakan publik (stakeholders)
5. Mengevaluasi opsi atau alternatif kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan publik strategis kepada pembuat kebijakan (*policy maker*)
6. Menyiapkan pidato, surat-menyurat serta dokumen untuk menteri
7. Menulis dan menyajikan laporan.

Demi pelaksanaan tanggung jawab demikian, maka seorang analis kebijakan publik diharapkan untuk memiliki kemampuan dan keterampilan, sebagai berikut:

⁶ <http://www.careers.govt.nz/jobs/government/policy-analyst/>

1. Pengetahuan tentang aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya di New Zealand
2. Pemahaman tentang bagaimana parlemen bekerja dan beroperasi
3. Pemahaman tentang pembuatan kebijakan publik di tataran legislatif dan eksekutif.
4. Pengetahuan tentang proses legislatif dan perjanjian Waitangi (*Treaty of Waitangi*)
5. Pengetahuan tentang metode penelitian
6. Keterampilan dalam menganalisis dan menafsirkan informasi
7. Penulisan laporan, perencanaan, pemecahan masalah, dan keterampilan manajemen waktu.

Di Kanada, seorang analis kebijakan memiliki tugas untuk mengembangkan kebijakan dan undang-undang. Pada konteks birokrasi, peran analis kebijakan di departemen lini adalah mengembangkan kebijakan dan melaksanakan rencana pengembangan demi mendukung tujuan pemerintah serta melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan termasuk pemerintah provinsi dan federal. Peran analis kebijakan di instansi pusat, adalah memberikan arahan strategis untuk membangun manajemen hubungan dengan pemerintah lain, masyarakat dan organisasi dalam mendukung tujuan pemerintah. Analis kebijakan di instansi pusat juga meninjau proposal untuk mengembangkan dan merubah kebijakan pemerintah, serta mengkoordinasikan pengembangan proposal kebijakan publik yang baru, mengulas seluruh peraturan dan proposal legislatif yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, dan memantau kemajuan kebijakan publik dalam mencapai tujuan pemerintah⁷. Secara rinci, tugas seorang analis kebijakan, antara lain:

1. Mengembangkan kebijakan dalam menanggapi isu-isu penting yang diidentifikasi oleh masyarakat, departemen dan pemerintah

7

2. Mengidentifikasi kesenjangan kebijakan, menganalisis isu-isu sosial yang kompleks, mengantisipasi keluaran kebijakan, memprioritaskan permasalahan dan membuat keputusan di atas pertentangan kepentingan
3. Membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program departemen untuk memastikan masyarakat menerima pelayanan pemerintah sebaik mungkin.

Dari pengalaman berbagai negara dalam menempatkan posisi analisis kebijakan, dapat terlihat bahwa analisis kebijakan memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan dalam proses kebijakan.

BAB III

MATERI MUATAN: PERATURAN KEPALA LAN TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

3.1 Level, Definisi dan Tugas Analis Kebijakan

3.1.1 Level Analis Kebijakan

Analisis kebijakan terbagi dalam empat level yakni pertama, muda, madya dan utama. Tiap level analisis kebijakan melakukan tugas dari tahapan prosedur analisis kebijakan.

Tabel 3.1 Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK)

Prosedur Analisis Kebijakan	Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK)			
	Pertama	Muda	Madya	Utama
<i>Perumusan Masalah (Problem Structuring)</i>	√	√	√	√
<i>Peramalan (Forecasting)</i>	√	√	√	√
<i>Rekomendasi (Recommendation)</i>	√	√	√	√
<i>Pemantauan (Monitoring)</i>	√	√	√	√
<i>Penilaian (Evaluation)</i>	√	√	√	√

Source: Diolah dari berbagai sumber (2013)

3.1.2 Definisi Analisis Kebijakan

- A. Jabatan fungsional analisis kebijakan Pertama adalah analisis yang mampu mereview dan mengidentifikasi bidang tugasnya.
- B. Jabatan fungsional analisis kebijakan Muda adalah analisis yang mampu merumuskan permasalahan dengan menggunakan metodologi penelitian.
- C. Jabatan fungsional analisis kebijakan Madya adalah analisis yang mampu melakukan kajian dengan mempertimbangkan konfigurasi politik nasional.
- D. Jabatan fungsional analisis kebijakan Utama adalah analisis yang mampu melakukan kajian strategis dengan mempertimbangkan konfigurasi politik nasional dan global.

3.1.3 Tugas Analisis Kebijakan

3.1.3.1 Tugas Analisis Kebijakan secara Umum

A. Jabatan fungsional analisis kebijakan pertama:

1. Merumuskan masalah meliputi: mereview kebijakan-kebijakan saat ini dan masa lalu, mereview situasi saat ini, dan mereview konsep-konsep dan paradigma kebijakan di bidang tertentu.
2. Mereview proyeksi ahli.
3. Memberikan rekomendasi meliputi: mereview kasus-kasus kebijakan yang terjadi.
4. Melakukan monitoring meliputi: menghasilkan amatan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
5. Melakukan Evaluasi meliputi: menghasilkan amatan kinerja kebijakan.

B. Jabatan fungsional analisis kebijakan muda:

1. Merumuskan masalah meliputi: mereview isu-isu berdasarkan data empirik, dan melakukan pemetaan kebijakan.
2. Membuat forecasting/peramalan meliputi: melakukan proyeksi melalui penggunaan metode statistik, dan melakukan skenario kebijakan.
3. Memberikan rekomendasi meliputi: merumuskan alternatif kebijakan melalui data statistik dan skenario.

4. Melakukan monitoring meliputi: menghasilkan telaah laporan kemajuan implementasi kebijakan.
5. Melakukan evaluasi meliputi: menghasilkan laporan penelitian mengenai evaluasi kebijakan.

C. Jabatan fungsional analis kebijakan madya:

1. Merumuskan masalah meliputi: mereviu berbagai sumber dan aktor kebijakan, dan melakukan pemetaan masalah, yakni dengan mereviu keterkaitan diantara isu-isu, mulai dari informasi yang kompleks hingga yang sederhana.
2. Membuat forecasting/Peramalan meliputi: memetakan sumber-sumber dan kepentingan para aktor, melakukan strategi advokasi, dan melakukan prediksi kebijakan berdasarkan situasi internal dan eksternal saat ini.
3. Memberikan rekomendasi meliputi: merumuskan alternatif kebijakan berdasarkan sumber-sumber dan para aktor kebijakan.
4. Melakukan monitoring meliputi: melakukan identifikasi tentang masalah teknis implementasi kebijakan.
5. Melakukan evaluasi meliputi: melakukan evaluasi teknis, setidaknya evaluasi kebijakan tunggal.

D. Jabatan fungsional analis kebijakan utama:

1. Merumuskan masalah meliputi: mereviu masalah-masalah kebijakan dari berbagai perspektif, dan mengidentifikasi isu kebijakan terkait pengalaman internasional.
2. Membuat forecasting/peramalan meliputi: melakukan konjektur melalui analisis kritis terhadap kecenderungan global, dan melakukan skenario tentang kebijakan strategik internasional.
3. Memberikan rekomendasi meliputi: merumuskan kajian prioritas kebijakan, dan merumuskan kebijakan yang mampu meng-counter kebijakan internasional (*confidential policy*).
4. Melakukan monitoring meliputi: mengidentifikasi masalah-masalah strategis dalam implementasi kebijakan.
5. Melakukan evaluasi meliputi: menghasilkan evaluasi strategis.

3.1.3.2 Tugas Analis Kebijakan secara Khusus

A. Jabatan fungsional analis kebijakan pertama

1. Perumusan Masalah (*Problem Structuring*): a) Mereviu kebijakan masa lalu dan saat ini; b) Mereviu situasi terkini; c) Mereviu konsep dan paradigma kebijakan pada bidang tertentu.
2. Peramalan (*Forecasting*): Mereviu proyeksi para ahli.

3. Rekomendasi (*Recommendation*): Mereviu pengalaman-pengalaman terbaik.
4. Pemantauan (*Monitoring*): Memantau pelaksanaan kebijakan di lapangan.
5. Penilaian (*Evaluasi*): Menilai kinerja kebijakan.

B. Jabatan fungsional analisis kebijakan muda

1. Perumusan Masalah (*Problem Structuring*): Menelaah laporan kemajuan.
2. Peramalan (*Forecasting*): Membuat proyeksi kebijakan dan skenario kebijakan berdasarkan data statistik.
3. Rekomendasi (*Recommendation*): Menyusun alternatif kebijakan dan skenario kebijakan berdasarkan data statistik.
4. Pemantauan (*Monitoring*): Mengkaji pelaksanaan kebijakan dalam wilayah kerja tertentu.
5. Penilaian (*Evaluasi*): Melakukan evaluasi kebijakan untuk melihat derajat efektivitas kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

C. Jabatan fungsional analisis kebijakan madya

1. Perumusan Masalah (*Problem Structuring*): Mengidentifikasi persoalan dari sisi politik nasional.
2. Peramalan (*Forecasting*): Memprediksi kebijakan yang komprehensif menggunakan instrumen data statistik dan kajian lingkungan politik nasional.
3. Rekomendasi (*Recommendation*): Mengkaji alternatif kebijakan menggunakan instrumen data statistik dan kajian lingkungan politik nasional.

4. Pemantauan (*Monitoring*): Mengidentifikasi permasalahan dalam pembuatan kebijakan menggunakan instrumen data statistik dan kajian lingkungan politik nasional.
5. Penilaian (*Evaluasi*): Menyelidiki efektivitas sebuah kebijakan menggunakan instrumen data statistik dan kajian lingkungan politik nasional.

D. Jabatan fungsional analisis kebijakan utama

1. Perumusan Masalah (*Problem Structuring*): a) Mereviu permasalahan kebijakan dari multi perspektif; b) Mereviu permasalahan kebijakan dari pengalaman internasional.
2. Peramalan (*Forecasting*): a) Membuat kajian kebijakan berdasarkan trend global; b) Membuat skenario kebijakan internasional yang strategis.
3. Rekomendasi (*Recommendation*): a) Membuat kajian prioritas kebijakan; b) Merumuskan kebijakan untuk merespon kebijakan internasional.
4. Pemantauan (*Monitoring*): Mengidentifikasi permasalahan strategis di dalam implementasi kebijakan.
5. Penilaian (*Evaluasi*): Melakukan evaluasi kebijakan global secara strategis.

3.2 Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan yang dibutuhkan

3.2.1 Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan yang dibutuhkan JFAK secara umum

JFAK Pertama

Penguasaan pengetahuan JFAK Pertama menyangkut pengetahuan dasar kebijakan (*basic policy knowledge*). Dengan demikian, per-definisi, JFAK Pertama adalah analisis kebijakan yang menguasai pengetahuan dasar kebijakan (*basic policy knowledge*) yang ditunjukkan melalui: a) Penguasaan terhadap substansi kebijakan; b) Sejarah dari satu kebijakan, dan c) Pengetahuan dasar tentang proses perumusan dan pengambilan keputusan. Dalam operasionalisasinya, JFAK Pertama harus memiliki berbagai pengetahuan, yaitu:

1. Pengetahuan tentang materi dan permasalahan pada satu bidang atau beberapa bidang yang terkait.
2. Pengetahuan tentang dasar-dasar kebijakan publik (konsep, paradigma, teori).
3. Pengetahuan tentang isu-isu dan masalah kebijakan publik yang terkait dengan bidang yang dikerjakan.
4. Pengetahuan tentang pembuatan kebijakan publik di tingkat eksekutif dan legislatif.
5. Pengetahuan tentang kebijakan, program, organisasi dan kegiatan yang belum atau sudah dilaksanakan, yang terkait dengan bidang yang dikerjakannya.
6. Pengetahuan tentang dasar-dasar penelitian.
7. Keterampilan dalam mengomparasikan atau membandingkan dasar-dasar kebijakan publik dan isu serta permasalahan kebijakan publik secara akurat.
8. Keterampilan dalam merangkum dengan menginkorporasikan seluruh ide dari para ahli kebijakan serta mengompilasi isu-isu kebijakan publik secara terorganisir.
9. Keterampilan dalam membuat kesimpulan dari sekumpulan informasi yang masih mentah menjadi informasi yang berguna bagi analisis kebijakan jenjang berikutnya.
10. Keterampilan dalam memahami penelitian dasar.

11. Kemampuan dalam menyajikan hasil komparasi atau perbandingan dasar-dasar kebijakan publik dan isu serta permasalahan kebijakan publik secara jelas.
12. Kemampuan dalam menulis rangkuman secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
13. Kemampuan dalam menyajikan kesimpulan secara ringkas dan padat .
14. Kemampuan menerapkan penelitian dasar.

JFAK Muda:

Penguasaan pengetahuan JFAK Muda menyangkut pengetahuan metode kebijakan (*policy method*). Dengan demikian, per-definisi, JFAK Muda adalah analisis kebijakan yang menguasai metodologi riset kebijakan dan pemetaan kebijakan. Dalam operasionalisasinya, JFAK Muda harus memiliki berbagai pengetahuan, yaitu:

1. Pengetahuan tentang penelitian lanjutan (*advanced research*) dan metodologi penelitian.
2. Keterampilan mengolah hasil pengumpulan data.
3. Keterampilan mengkaji hasil pengolahan data.
4. Keterampilan dalam memetakan posisi sebuah kebijakan dari kajian historis kebijakan.
5. Keterampilan dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari kajian historis kebijakan
6. Keterampilan dalam menilai hasil pengolahan data yang digunakan untuk menyusun berbagai skenario kebijakan.
7. Keterampilan dalam memilih alternatif kebijakan yang paling tepat.
8. Kemampuan dalam mengelola kegiatan penelitian (manajemen penelitian).
9. Kemampuan dalam menyajikan hasil pengolahan data.
10. Kemampuan dalam membuat peta kebijakan.
11. Kemampuan dalam menyusun skenario kebijakan
12. Kemampuan dalam menentukan rekomendasi kebijakan
13. Kemampuan dalam berinteraksi dengan para ahli di bidang yang sama dan yang terkait.

JFAK Madya:

Penguasaan pengetahuan JFAK Madya menyangkut pengetahuan advokasi kebijakan (*policy advocacy*). Dengan demikian, per-definisi, JFAK Madya adalah analisis kebijakan yang memiliki kemampuan untuk mengkonversi informasi ilmiah

(*scientific information*) menjadi informasi kebijakan (*policy information*), dan mengadvokasi kebijakan tersebut. Dalam operasionalisasinya, JFAK Muda harus memiliki berbagai pengetahuan, yaitu:

1. Pengetahuan tentang peta dan sistem politik nasional.
2. Keterampilan dalam bekerjasama dengan pembuat kebijakan (*policy maker*).
3. Keterampilan dalam menangani banyaknya jumlah informasi secara efektif.
4. Keterampilan dalam memilah informasi secara efektif yang sesuai dengan isu dan permasalahan kebijakan publik.
5. Kemampuan dalam mengeksplorasi dan menyajikan isu dan permasalahan kebijakan publik dalam tataran teknis dan institusional.
6. Keterampilan dalam memahami peta dan sistem politik nasional.
7. Keterampilan dalam memetakan isu kebijakan publik dengan kepentingan dan ideologi aktor-aktor politik nasional serta sumberdaya yang dimiliki para aktor tersebut.
8. Kemampuan untuk secara efektif mengorganisir dan menyajikan ide-ide secara lisan dan tertulis, dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan menyusun fakta-fakta secara objektif.

JFAK Utama:

Penguasaan pengetahuan JFAK Utama menyangkut pengetahuan strategi dan nilai kebijakan (*policy value and strategy*). Dengan demikian, per-definisi, JFAK Utama adalah analisis kebijakan yang memiliki kemampuan untuk merumuskan nilai-nilai prioritas bangsa dan mengintegrasikan dalam kebijakan nasional serta menyusun strategi nasional di tengah kompetisi global. Dalam operasionalisasinya, JFAK Utama harus memiliki berbagai pengetahuan, yaitu:

1. Keterampilan dalam memahami peta dan sistem politik nasional dan global dimana sebuah kebijakan dibuat dan diimplementasikan.
2. Keterampilan dalam penyusunan dan penyajian isu dan permasalahan yang sangat kompleks menjadi informasi kebijakan yang dapat dipahami oleh publik dan *policy maker*.
3. Keterampilan untuk melakukan penilaian dalam semua tahapan analisis, mulai dari memilah masalah yang rutin dan penting, mengenali tingkat kegentingan satu situasi, dan menyusun opsi yang paling layak.
4. Keterampilan dalam menyusun skenario kebijakan dengan mempertimbangkan situasi politik nasional dan global.

5. Kemampuan dalam mengolah bahasa sehingga mudah dalam mengkomunikasikannya kepada publik dan *policy maker*.
6. Kemampuan dalam memetakan isu kebijakan publik dengan kepentingan dan ideologi aktor-aktor politik nasional dan global serta sumberdaya yang dimiliki para aktor tersebut.
7. Kemampuan dalam merumuskan kebijakan dengan cepat dan merespon kebijakan yang strategis dalam situasi krisis (*crisis advice*).
8. Kemampuan untuk bekerja secara efektif di bawah tekanan waktu yang ketat dan tenggat waktu yang kaku.

3.2.2 Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan yang dibutuhkan JFAK secara khusus

JFAK Pertama

Tabel 3.2 Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan JFAK Pertama

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Prosedur Analisis Kebijakan Publik	Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan (PK2)
Pertama	<i>Problem Structuring</i> (Merumuskan Masalah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang materi dan permasalahan pada satu bidang atau beberapa bidang yang terkait. 2. Pengetahuan tentang dasar-dasar kebijakan publik (konsep, paradigma, teori). 3. Pengetahuan tentang isu-isu dan masalah kebijakan publik yang terkait dengan bidang yang dikerjakan. 4. Pengetahuan tentang pembuatan kebijakan publik di tingkat eksekutif dan legislatif. 5. Keterampilan dalam mengomparasikan atau membandingkan dasar-dasar kebijakan publik dan isu serta permasalahan kebijakan publik secara akurat. 6. Keterampilan dalam merangkum dengan menginkorporasikan seluruh ide dari para ahli kebijakan serta mengompilasi isu-isu kebijakan publik secara terorganisir. 7. Kemampuan dalam menulis rangkuman secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
	<i>Forecasting</i> (Meramalkan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang materi dan permasalahan pada satu bidang atau beberapa bidang yang terkait. 2. Pengetahuan tentang dasar-dasar kebijakan publik (konsep, paradigma, teori). 3. Pengetahuan tentang isu-isu dan masalah kebijakan publik yang terkait dengan bidang yang dikerjakan. 4. Pengetahuan tentang pembuatan kebijakan publik di tingkat eksekutif dan legislatif.

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Prosedur Analisis Kebijakan Publik	Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan (PK2)
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengetahuan tentang kebijakan, program, organisasi dan kegiatan yang belum atau sudah dilaksanakan, yang terkait dengan bidang yang dikerjakannya. 6. Keterampilan dalam merangkum dengan menginkorporasikan seluruh ide dari para ahli kebijakan serta mengompilasi isu-isu kebijakan publik secara terorganisir. 7. Keterampilan dalam membuat kesimpulan dari sekumpulan informasi yang masih mentah menjadi informasi yang berguna bagi analisis kebijakan jenjang berikutnya. 8. Kemampuan dalam menulis rangkuman secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 9. Kemampuan dalam menyajikan kesimpulan secara ringkas dan padat.
	<i>Recommendation</i> (Merekomendasikan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang materi dan permasalahan pada satu bidang atau beberapa bidang yang terkait. 2. Pengetahuan tentang dasar-dasar kebijakan publik (konsep, paradigma, teori). 3. Pengetahuan tentang isu-isu dan masalah kebijakan publik yang terkait dengan bidang yang dikerjakan. 4. Pengetahuan tentang pembuatan kebijakan publik di tingkat eksekutif dan legislatif. 5. Keterampilan dalam merangkum dengan menginkorporasikan seluruh ide dari para ahli kebijakan serta mengompilasi isu-isu kebijakan publik secara terorganisir. 6. Keterampilan dalam mengomparasikan atau membandingkan dasar-dasar kebijakan publik dan isu serta permasalahan kebijakan publik secara akurat. 7. Keterampilan dalam membuat kesimpulan dari sekumpulan informasi yang masih mentah menjadi informasi yang berguna bagi analisis kebijakan jenjang berikutnya. 8. Kemampuan dalam menulis rangkuman secara jelas dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 9. Kemampuan dalam menyajikan hasil komparasi atau perbandingan dasar-dasar kebijakan publik dan isu serta permasalahan kebijakan publik secara jelas. 10. Kemampuan dalam menyajikan kesimpulan ringkas dan padat.
	<i>Monitoring</i> (Memantau)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang materi dan permasalahan pada satu bidang atau beberapa bidang yang terkait. 2. Pengetahuan tentang dasar-dasar kebijakan publik (konsep, paradigma, teori). 3. Pengetahuan tentang isu-isu dan masalah kebijakan publik yang terkait dengan bidang yang dikerjakan. 4. Pengetahuan tentang pembuatan kebijakan publik di

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Prosedur Analisis Kebijakan Publik	Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan (PK2)
		<p>tingkat eksekutif dan legislatif.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pengetahuan tentang kebijakan, program, organisasi dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang terkait dengan bidang yang dikerjakannya. 6. Pengetahuan tentang dasar-dasar penelitian. 7. Keterampilan dalam membuat kesimpulan dari sekumpulan informasi yang masih mentah menjadi informasi yang berguna bagi analisis kebijakan jenjang berikutnya. 8. Keterampilan dalam memahami penelitian dasar. 9. Kemampuan dalam menyajikan kesimpulan secara ringkas dan padat . 10. Kemampuan menerapkan penelitian dasar.
	<i>Evaluation (Menilai)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang materi dan permasalahan pada satu bidang atau beberapa bidang yang terkait. 2. Pengetahuan tentang dasar-dasar kebijakan publik (konsep, paradigma, teori). 3. Pengetahuan tentang isu-isu dan masalah kebijakan publik yang terkait dengan bidang yang dikerjakan. 4. Pengetahuan tentang pembuatan kebijakan publik di tingkat eksekutif dan legislatif. 5. Pengetahuan tentang kebijakan, program, organisasi dan kegiatan yang belum atau sudah dilaksanakan, yang terkait dengan bidang yang dikerjakannya. 6. Pengetahuan tentang dasar-dasar penelitian. 7. Keterampilan dalam membuat kesimpulan dari sekumpulan informasi yang masih mentah menjadi informasi yang berguna bagi analisis kebijakan jenjang berikutnya. 8. Keterampilan dalam memahami penelitian dasar. 9. Kemampuan dalam menyajikan kesimpulan secara ringkas dan padat sebagai bentuk hasil evaluasi. 10. Kemampuan menerapkan penelitian dasar.

Tabel 3.3 Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan JFAK Muda

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Prosedur Analisis Kebijakan Publik	Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan (PK2)
Muda	<i>Problem Structuring</i> (Merumuskan Masalah)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan tentang penelitian lanjutan (<i>advanced research</i>) dan metodologi penelitian.2. Keterampilan mengolah hasil pengumpulan data.3. Keterampilan mengkaji hasil pengolahan data.4. Keterampilan dalam memetakan posisi sebuah kebijakan dari kajian historis kebijakan.5. Keterampilan dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari kajian historis kebijakan.6. Kemampuan dalam mengelola kegiatan penelitian (manajemen penelitian).7. Kemampuan dalam menyajikan hasil pengolahan data.8. Kemampuan dalam membuat peta kebijakan.
	<i>Forecasting</i> (Meramalkan)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan tentang penelitian lanjutan (<i>advanced research</i>) dan metodologi penelitian.2. Keterampilan mengolah hasil pengumpulan data.3. Keterampilan mengkaji hasil pengolahan data.4. Keterampilan dalam memetakan posisi sebuah kebijakan dari kajian historis kebijakan.5. Keterampilan dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari kajian historis kebijakan.6. Keterampilan dalam menilai hasil pengolahan data yang digunakan untuk menyusun berbagai skenario kebijakan.7. Kemampuan dalam mengelola kegiatan penelitian (manajemen penelitian).8. Kemampuan dalam menyajikan hasil pengolahan data.9. Kemampuan dalam menyusun skenario kebijakan.
	<i>Recommendation</i> (Merekomendasikan)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan tentang penelitian lanjutan (<i>advanced research</i>) dan metodologi penelitian.2. Keterampilan mengolah hasil pengumpulan data.3. Keterampilan mengkaji hasil pengolahan data.4. Keterampilan dalam memetakan posisi sebuah kebijakan dari kajian historis kebijakan.5. Keterampilan dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari kajian historis kebijakan.6. Keterampilan dalam menilai hasil pengolahan data yang digunakan untuk menyusun berbagai skenario kebijakan.7. Keterampilan dalam memilih alternatif kebijakan yang paling tepat.

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Prosedur Analisis Kebijakan Publik	Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan (PK2)
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Kemampuan dalam mengelola kegiatan penelitian (manajemen penelitian). 9. Kemampuan dalam menyajikan hasil pengolahan data. 10. Kemampuan dalam membuat peta kebijakan. 11. Kemampuan dalam menyusun skenario kebijakan 12. Kemampuan dalam menentukan rekomendasi kebijakan 13. Kemampuan dalam berinteraksi dengan para ahli di bidang yang sama dan yang terkait.
	<i>Monitoring</i> (Memantau)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang penelitian lanjutan (<i>advanced research</i>) dan metodologi penelitian. 2. Keterampilan mengolah hasil pengumpulan data. 3. Keterampilan mengkaji hasil pengolahan data. 4. Keterampilan dalam memetakan posisi sebuah kebijakan dari kajian historis kebijakan. 5. Keterampilan dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari kajian historis kebijakan 6. Kemampuan dalam mengelola kegiatan penelitian (manajemen penelitian). 7. Kemampuan dalam menyajikan hasil pengolahan data. 8. Kemampuan dalam berinteraksi dengan para ahli di bidang yang sama dan yang terkait.
	<i>Evaluation</i> (Menilai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang penelitian lanjutan (<i>advanced research</i>) dan metodologi penelitian. 2. Keterampilan mengolah hasil pengumpulan data. 3. Keterampilan mengkaji hasil pengolahan data. 4. Keterampilan dalam memetakan posisi sebuah kebijakan dari kajian historis kebijakan. 5. Keterampilan dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari kajian historis kebijakan 6. Kemampuan dalam mengelola kegiatan penelitian (manajemen penelitian). 7. Kemampuan dalam menyajikan hasil pengolahan data sebagai bentuk hasil evaluasi. 8. Kemampuan dalam berinteraksi dengan para ahli di bidang yang sama dan yang terkait.

Tabel 3.4 Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan JFAK Madya

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Prosedur Analisis Kebijakan Publik	Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan (PK2)
Madya	<i>Problem Structuring</i> (Merumuskan Masalah)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan tentang peta dan sistem politik nasional.2. Keterampilan dalam bekerjasama dengan pembuat kebijakan (policy maker).3. Keterampilan dalam menangani banyaknya jumlah informasi secara efektif.4. Keterampilan dalam memilah informasi secara efektif yang sesuai dengan isu dan permasalahan kebijakan publik.5. Kemampuan dalam mengeksplorasi dan menyajikan isu dan permasalahan kebijakan publik dalam tataran teknis dan institusional.6. Keterampilan dalam memahami peta dan sistem politik nasional.7. Keterampilan dalam memetakan isu kebijakan publik dengan kepentingan dan ideologi aktor-aktor politik nasional serta sumberdaya yang dimiliki para aktor tersebut.8. Kemampuan untuk secara efektif mengorganisir dan menyajikan ide-ide secara lisan dan tertulis, dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan menyusun fakta-fakta secara objektif.
	<i>Forecasting</i> (Meramalkan)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan tentang peta dan sistem politik nasional.2. Keterampilan dalam bekerjasama dengan pembuat kebijakan (policy maker).3. Keterampilan dalam menangani banyaknya jumlah informasi secara efektif.4. Keterampilan dalam memilah informasi secara efektif yang sesuai dengan isu dan permasalahan kebijakan publik.5. Kemampuan dalam mengeksplorasi dan menyajikan isu dan permasalahan kebijakan publik dalam tataran teknis dan institusional.6. Keterampilan dalam memahami peta dan sistem politik nasional.7. Keterampilan dalam memetakan isu kebijakan publik dengan kepentingan dan ideologi aktor-aktor politik nasional serta sumberdaya yang dimiliki para aktor tersebut.8. Kemampuan untuk secara efektif mengorganisir dan menyajikan ide-ide secara

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Prosedur Analisis Kebijakan Publik	Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan (PK2)
		lisan dan tertulis, dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan menyusun fakta-fakta secara objektif.
	<i>Recommendation</i> (Merekomendasikan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang peta dan sistem politik nasional. 2. Keterampilan dalam bekerjasama dengan pembuat kebijakan (policy maker). 3. Keterampilan dalam menangani banyaknya jumlah informasi secara efektif. 4. Keterampilan dalam memilah informasi secara efektif yang sesuai dengan isu dan permasalahan kebijakan publik. 5. Kemampuan dalam mengeksplorasi dan menyajikan isu dan permasalahan kebijakan publik dalam tataran teknis dan institusional. 6. Keterampilan dalam memahami peta dan sistem politik nasional. 7. Keterampilan dalam memetakan isu kebijakan publik dengan kepentingan dan ideologi aktor-aktor politik nasional serta sumberdaya yang dimiliki para aktor tersebut. 8. Kemampuan untuk secara efektif mengorganisir dan menyajikan ide-ide secara lisan dan tertulis, dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan menyusun fakta-fakta secara objektif.
	<i>Monitoring</i> (Memantau)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang peta dan sistem politik nasional. 2. Keterampilan dalam bekerjasama dengan pembuat kebijakan (policy maker). 3. Keterampilan dalam menangani banyaknya jumlah informasi secara efektif. 4. Keterampilan dalam memilah informasi secara efektif yang sesuai dengan isu dan permasalahan kebijakan publik. 5. Kemampuan dalam mengeksplorasi dan menyajikan isu dan permasalahan kebijakan publik dalam tataran teknis dan institusional.. 6. Keterampilan dalam memahami peta dan sistem politik nasional. 7. Keterampilan dalam memetakan isu kebijakan publik dengan kepentingan dan ideologi aktor-aktor politik nasional serta sumberdaya yang dimiliki para aktor tersebut. 8. Kemampuan untuk secara efektif mengorganisir dan menyajikan ide-ide secara lisan dan tertulis, dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan menyusun fakta-fakta

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Prosedur Analisis Kebijakan Publik	Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan (PK2)
		secara objektif.
	<i>Evaluation (Menilai)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang peta dan sistem politik nasional. 2. Keterampilan dalam bekerjasama dengan pembuat kebijakan (policy maker). 3. Keterampilan dalam menangani banyaknya jumlah informasi secara efektif. 4. Keterampilan dalam memilah informasi secara efektif yang sesuai dengan isu dan permasalahan kebijakan publik. 5. Kemampuan dalam mengeksplorasi dan menyajikan isu dan permasalahan kebijakan publik dalam tataran teknis dan institusional. 6. Keterampilan dalam memahami peta dan sistem politik nasional. 7. Keterampilan dalam memetakan isu kebijakan publik dengan kepentingan dan ideologi aktor-aktor politik nasional serta sumberdaya yang dimiliki para aktor tersebut. 8. Kemampuan untuk secara efektif mengorganisir dan menyajikan ide-ide secara lisan dan tertulis, dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan menyusun fakta-fakta secara objektif sebagai hasil evaluasi.

Tabel 3.5 Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan JFAK Utama

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Prosedur Analisis Kebijakan Publik	Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan (PK2)
Utama	<i>Problem Structuring</i> (Merumuskan Masalah)	<ol style="list-style-type: none">1. Keterampilan dalam memahami peta dan sistem politik nasional dan global dimana sebuah kebijakan dibuat dan diimplementasikan.2. Keterampilan dalam penyusunan dan penyajian isu dan permasalahan yang sangat kompleks menjadi informasi kebijakan yang dapat dipahami oleh publik dan <i>policy maker</i>.3. Keterampilan untuk melakukan penilaian dalam semua tahapan analisis, mulai dari memilah masalah yang rutin dan penting, mengenali tingkat kegentingan satu situasi.4. Kemampuan dalam mengolah bahasa sehingga mudah dalam mengkomunikasikannya kepada publik dan <i>policy maker</i>.5. Kemampuan dalam memetakan isu kebijakan publik dengan kepentingan dan ideologi aktor-aktor politik nasional dan global serta sumberdaya yang dimiliki para aktor tersebut.6. Kemampuan untuk bekerja secara efektif di bawah tekanan waktu yang ketat dan tenggat waktu yang kaku.
	<i>Forecasting</i> (Meramalkan)	<ol style="list-style-type: none">1. Keterampilan dalam memahami peta dan sistem politik nasional dan global dimana sebuah kebijakan dibuat dan diimplementasikan.2. Keterampilan dalam penyusunan dan penyajian isu dan permasalahan yang sangat kompleks menjadi informasi kebijakan yang dapat dipahami oleh publik dan <i>policy maker</i>.3. Keterampilan untuk melakukan penilaian dalam semua tahapan analisis, mulai dari memilah masalah yang rutin dan penting, mengenali tingkat kegentingan satu situasi, dan menyusun opsi yang paling layak.4. Keterampilan dalam menyusun skenario kebijakan dengan mempertimbangkan situasi politik nasional dan global.5. Kemampuan dalam mengolah bahasa sehingga mudah dalam mengkomunikasikannya kepada publik dan <i>policy maker</i>.

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Prosedur Analisis Kebijakan Publik	Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan (PK2)
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Kemampuan dalam memetakan isu kebijakan publik dengan kepentingan dan ideologi aktor-aktor politik nasional dan global serta sumberdaya yang dimiliki para aktor tersebut. 7. Kemampuan untuk bekerja secara efektif di bawah tekanan waktu yang ketat dan tenggat waktu yang kaku.
	<i>Recommendation</i> (Merekomendasikan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan dalam memahami peta dan sistem politik nasional dan global dimana sebuah kebijakan dibuat dan diimplementasikan. 2. Keterampilan dalam penyusunan dan penyajian isu dan permasalahan yang sangat kompleks menjadi informasi kebijakan yang dapat dipahami oleh publik dan <i>policy maker</i>. 3. Keterampilan untuk melakukan penilaian dalam semua tahapan analisis, mulai dari memilah masalah yang rutin dan penting, mengenali tingkat kegentingan satu situasi, dan menyusun opsi yang paling layak. 4. Keterampilan dalam menyusun skenario kebijakan dengan mempertimbangkan situasi politik nasional dan global. 5. Kemampuan dalam mengolah bahasa sehingga mudah dalam mengkomunikasikannya kepada publik dan <i>policy maker</i>. 6. Kemampuan dalam memetakan isu kebijakan publik dengan kepentingan dan ideologi aktor-aktor politik nasional dan global serta sumberdaya yang dimiliki para aktor tersebut. 7. Kemampuan dalam merumuskan kebijakan dengan cepat dan merespon kebijakan yang strategis dalam situasi krisis (<i>crisis advice</i>). 8. Kemampuan untuk bekerja secara efektif di bawah tekanan waktu yang ketat dan tenggat waktu yang kaku.
	<i>Monitoring</i> (Memantau)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan dalam memahami peta dan sistem politik nasional dan global dimana sebuah kebijakan dibuat dan diimplementasikan. 2. Keterampilan dalam penyusunan dan penyajian isu dan permasalahan yang sangat kompleks menjadi informasi kebijakan yang dapat dipahami oleh publik dan <i>policy maker</i>. 3. Keterampilan untuk melakukan penilaian dalam semua tahapan analisis, mulai dari memilah masalah yang rutin dan penting,

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Prosedur Analisis Kebijakan Publik	Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan (PK2)
		<p>mengenali tingkat kegentingan satu situasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kemampuan dalam mengolah bahasa sehingga mudah dalam mengkomunikasikannya kepada publik dan <i>policy maker</i>. 5. Kemampuan dalam memetakan isu kebijakan publik dengan kepentingan dan ideologi aktor-aktor politik nasional dan global serta sumberdaya yang dimiliki para aktor tersebut. 6. Kemampuan dalam merumuskan kebijakan dengan cepat dan merespon kebijakan yang strategis dalam situasi krisis (<i>crisis advice</i>). 7. Kemampuan untuk bekerja secara efektif di bawah tekanan waktu yang ketat dan tenggat waktu yang kaku.
	<p><i>Evaluation</i> (Menilai)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan dalam memahami peta dan sistem politik nasional dan global dimana sebuah kebijakan dibuat dan diimplementasikan. 2. Keterampilan dalam penyusunan dan penyajian isu dan permasalahan yang sangat kompleks menjadi informasi kebijakan yang dapat dipahami oleh publik dan <i>policy maker</i>. 3. Keterampilan untuk melakukan penilaian dalam semua tahapan analisis, mulai dari memilah masalah yang rutin dan penting, mengenali tingkat kegentingan satu situasi, dan menyusun opsi yang paling layak. 4. Keterampilan dalam menyusun skenario kebijakan dengan mempertimbangkan situasi politik nasional dan global. 5. Kemampuan dalam mengolah bahasa sehingga mudah dalam mengkomunikasikannya kepada publik dan <i>policy maker</i>. 6. Kemampuan dalam memetakan isu kebijakan publik dengan kepentingan dan ideologi aktor-aktor politik nasional dan global serta sumberdaya yang dimiliki para aktor tersebut sebagai hasil evaluasi. 7. Kemampuan dalam merumuskan kebijakan dengan cepat dan merespon kebijakan yang strategis dalam situasi krisis (<i>crisis advice</i>). 8. Kemampuan untuk bekerja secara efektif di bawah tekanan waktu yang ketat dan tenggat waktu yang kaku.

3.3 Produk Analisis Kebijakan dan Isi Produk Analisis Kebijakan

3.3.1 Produk Analisis Kebijakan Utama

Produk Analisis Kebijakan Pertama

Tabel 3.6 Produk Analisis Kebijakan Pertama

No	Prosedur Analisis Kebijakan	Produk	Definisi Produk	Isi Produk
1	Perumusan Masalah (<i>Problem Structuring</i>)	1. Narasi kebijakan – tentang kebijakan masa lalu dan saat ini ; 2. Narasi kebijakan – tentang situasi saat ini ;	Narasi Kebijakan adalah rangkuman hasil penelitian mengenai kebijakan di bidang tertentu, yang telah dilakukan di Indonesia dan di negara lain.	1. Identifikasi tentang isi kebijakan 2. Identifikasi persoalan yang muncul dari kebijakan tersebut; 3. Tabel perbandingan yang berisi komparasi isi kebijakan antar daerah maupun negara.
		Tinjauan Pustaka	Tinjauan pustaka adalah deskripsi mengenai konsep dan paradigma kebijakan dalam bidang kerjanya.	1. Rangkuman tentang pendapat para ahli dalam bidang kebijakan tertentu; 2. Rangkuman tentang kronologi paradigma kebijakan yang telah diimplementasikan. 3. Kritik mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing paradigma.
2	Peramalan (<i>Forecasting</i>)	Proyeksi Kebijakan	Proyeksi kebijakan adalah hasil kompilasi proyeksi kebijakan para ahli di bidang tertentu yang diambil dari sumber reliable dan ditampilkan dalam bentuk ringkasan yang mudah dibaca. Sumber: Jurnal ilmiah Buku Media massa Hasil penelitian lembaga	1. Kumpulan proyeksi kebijakan dari para ahli; 2. Kesimpulan penting dari setiap proyeksi kebijakan dan komparasi dari proyeksi kebijakan tersebut; 3. Catatan referensi dari sumber yang <i>reliable</i> .
3	Perekomendasi (<i>Recommendation</i>)	Kiat Kebijakan	Kiat kebijakan adalah kumpulan rekomendasi kebijakan yang berhasil, baik yang berasal dari Indonesia maupun negara lain.	1. Rangkuman rekomendasi kebijakan. 2. Tabel komparasi kebijakan. 3. Pembelajaran yang

No	Prosedur Analisis Kebijakan	Produk	Definisi Produk	Isi Produk
				dapat diambil dari kasus-kasus tersebut. 4. Catatan referensi sumber.
4	Pengamatan (<i>Monitoring</i>)	Amatan Kebijakan	Amatan kebijakan adalah hasil observasi dari implementasi sebuah kebijakan yang dilakukan secara langsung di lapangan dalam bentuk deskripsi kasus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi kebijakan yang diobservasi. 2. Deskripsi keluaran kebijakan yang diobservasi. 3. Deskripsi pelaksanaan kebijakan. 4. Deskripsi ada tidaknya kesenjangan antara ekspektasi dan realisasi (<i>das sein dan das sollen</i>).
5	Penilaian (<i>Evaluation</i>)	Pelacakan Kinerja Kebijakan	Pelacakan kinerja kebijakan adalah hasil dari pengamatan kinerja kebijakan di lapangan untuk menggali fakta-fakta empiris dalam mengetahui efektivitas kebijakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi kebijakan yang dievaluasi. 2. Deskripsi hasil dari kebijakan. 3. Deskripsi pelaksanaan kebijakan. 4. Deskripsi ada tidaknya kesenjangan antara tujuan dan hasil kebijakan.

Produk Analisis Kebijakan Muda

Tabel 3.7 Produk Analisis Kebijakan Muda

No	Prosedur Analisis Kebijakan	Produk	Definisi Produk	Isi Produk
1	Perumusan Masalah (<i>Problem Structuring</i>)	1. Ulasan Kebijakan	Ulasan kebijakan adalah hasil pekerjaan analisis kebijakan yang berusaha untuk menjelaskan dan menafsirkan kebijakan berdasarkan pada data-data empiris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan masalah kebijakan berdasarkan data empiris yang bersumber dari berbagai macam data yang diperoleh melalui observasi, survey, FGD dll; 2. Identifikasi variabel-variabel yang menjadi sebab dari sebuah permasalahan (<i>expanding the horizon</i>) 3. Identifikasi kemungkinan hubungan sebab akibat dari munculnya permasalahan (<i>merumuskan hipotesis</i>).
		2. Peta Kebijakan	Peta kebijakan adalah hasil pekerjaan analisis kebijakan yang berusaha untuk memberikan kajian perspektif historis dari sebuah kebijakan termasuk memetakan produk hukum dan regulasi yang pernah diterapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pohon kebijakan 2. Pemetaan posisi sebuah kebijakan dari rangkaian kebijakan yang telah diambil sebelumnya. 3. Identifikasi permasalahan, hubungan sebab akibat, serta kontradiksi dari kegagalan kebijakan yang telah diambil sebelumnya.
2	Peramalan (<i>Forecasting</i>)	Prediksi Kebijakan	<p>Prediksi kebijakan adalah gambaran komprehensif masa depan kebijakan dalam dua situasi, yakni situasi ceteris paribus dan situasi apabila dilakukan intervensi.</p> <p>Penggambaran tersebut dibuat berdasarkan data-data empiris dengan menggunakan teknik-teknik statistik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendeskripsikan hasil prediksi kebijakan dengan berbagai teknik penelitian; 2. Analisa mengenai gambaran masa depan kebijakan dalam situasi yang ceteris paribus; 3. Analisa mengenai gambaran masa depan kebijakan dalam situasi apabila

No	Prosedur Analisis Kebijakan	Produk	Definisi Produk	Isi Produk
			dan teknik penelitian yang lain.	dilakukan intervensi.
3	Perekomendasian (<i>Recommendation</i>)	Risalah Kebijakan	Risalah kebijakan adalah laporan ringkas yang berisi kebijakan alternatif yang dibuat berdasarkan data statistik dan skenario kebijakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi indikator dalam menilai alternatif kebijakan; 2. Identifikasi alternatif kebijakan; 3. Analisa mengenai implikasi dari setiap alternatif dan skenario kebijakan berdasarkan pada indikator yang telah ditetapkan; 4. Tabel komparasi dari setiap alternatif dan skenario kebijakan; 5. Rekomendasi kebijakan.
4	Pengamatan (<i>Monitoring</i>)	Pantauan Kebijakan	Pantauan kebijakan adalah kajian mengenai implementasi sebuah kebijakan berdasarkan analisis data empiris yang mencakup seluruh wilayah yang menjadi bidang kerjanya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi kebijakan yang diobservasi dalam cakupan bidang kerja; 2. Deskripsi keluaran kebijakan yang diobservasi dalam cakupan bidang kerja; 3. Deskripsi pelaksanaan kebijakan dalam cakupan bidang kerja 4. Deskripsi ada tidaknya kesenjangan antara ekspektasi dan realisasi (das sein dan das sollen) dalam cakupan bidang kerja; 5. Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kesenjangan antara das sein dan das sollen.
5	Penilaian (<i>Evaluation</i>)	Eksaminasi Kebijakan	Eksaminasi kebijakan adalah laporan evaluasi kebijakan untuk mengetahui derajat efektivitas kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, berdasarkan analisis data empiris mencakup wilayah yang menjadi bidang kerjanya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi kebijakan yang dievaluasi dalam cakupan bidang kerja; 2. Deskripsi hasil dari kebijakan dalam cakupan bidang kerja; 3. Deskripsi pelaksanaan kebijakan dalam cakupan bidang kerja; 4. Deskripsi ada tidaknya kesenjangan antara tujuan dan hasil kebijakan dalam cakupan bidang kerja;

No	Prosedur Analisis Kebijakan	Produk	Definisi Produk	Isi Produk
				5. Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara tujuan dan hasil kebijakan.

Tabel 3.8 Produk Analisis Kebijakan Madya

No	Prosedur Analisis Kebijakan	Produk	Definisi Produk	Isi Produk
1	Perumusan Masalah (<i>Problem Structuring</i>)	1. Telaah Kebijakan	Telaah kebijakan adalah telaah untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul dari sisi politik nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan probem politik yang muncul dari kebijakan 2. Pemetaan aktor yang memiliki kepentingan atas persoalan 3. Pemetaan ideologi dan nilai aktor 4. Pemetaan sumberdaya aktor
		2. Makalah Kebijakan	Makalah kebijakan adalah hasil pekerjaan analis yang memberikan kajian permasalahan kebijakan yang komprehensif mulai dari aspek teknis, organisasional dan aspek politis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian mengenai permasalahan kebijakan dari sisi teknis; 2. Kajian mengenai permasalahan kebijakan dari sisi kelembagaan atau organisasional; 3. Kajian mengenai kebijakan dari sisi politik nasional. 4. Kesimpulan dari kajian permasalahan kebijakan yang bersifat teknis, organisasional dan pioltis.
2	Peramalan (<i>Forecasting</i>)	Prognosis Kebijakan	Prognosis kebijakan adalah prediksi kebijakan yang komprehensif, yang dibuat berdasarkan data-data statistik dan kajian politik nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian mengenai prediksi kebijakan dengan menggunakan data-data statistik; 2. Kajian mengenai prediksi kebijakan dengan menganalisa lingkungan politik nasional; 3. Skenario kebijakan yang dibuat berdasarkan data statistik dan hasil analisis politik nasional.
3	Perekomendasi (<i>Recommendation</i>)	Memo Kebijakan	Memo kebijakan adalah kajian mengenai alternatif kebijakan yang dibuat berdasarkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian mengenai indikator dalam menilai alternatif kebijakan;

No	Prosedur Analisis Kebijakan	Produk	Definisi Produk	Isi Produk
			analisis data statistik dan situasi politik nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kajian alternatif kebijakan; 3. Analisa mengenai implikasi dari setiap alternatif dan skenario kebijakan berdasarkan pada indikator yang telah ditetapkan serta konfigurasi politik nasional; 4. Tabel komparasi dari setiap alternatif dan skenario kebijakan dalam konteks politik nasional; 5. Kajian mengenai alternatif terpilih dalam konteks politik nasional.
4	Pengamatan (<i>Monitoring</i>)	Tinjauan Kebijakan	Tinjauan kebijakan adalah identifikasi mengenai permasalahan dalam pengimplementasian sebuah kebijakan berdasarkan data statistik dan situasi politik nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian mengenai kebijakan yang diobservasi dalam konfigurasi politik nasional; 2. Kajian mengenai keluaran kebijakan yang diobservasi dalam konfigurasi politik nasional; 3. Kajian mengenai pelaksanaan kebijakan dalam konfigurasi politik nasional; 4. Kajian ada tidaknya kesenjangan antara tujuan dan keluaran dengan melihat lingkungan politik nasional; 5. Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kesenjangan antara tujuan dan keluaran dalam konfigurasi politik nasional.
5	Penilaian (<i>Evaluation</i>)	Penyelidikan Kebijakan	Penyelidikan kebijakan adalah identifikasi hubungan sebab akibat antar variabel yang mempengaruhi derajat efektivitas kebijakan berdasarkan data statistik dan kajian situasi politik nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian kebijakan yang dievaluasi dalam konfigurasi politik nasional; 2. Kajian hasil kebijakan dalam konfigurasi politik nasional; 3. Kajian pelaksanaan kebijakan dalam

No	Prosedur Analisis Kebijakan	Produk	Definisi Produk	Isi Produk
				konfigurasi politik nasional; 4. Kajian ada tidaknya kesenjangan antara tujuan dan hasil kebijakan dalam konfigurasi politik nasional; 5. Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara tujuan dan hasil kebijakan dalam konfigurasi politik nasional.

Produk Analisis Kebijakan Utama

Tabel 3.9 Produk Analisis Kebijakan Utama

No	Prosedur Analisis Kebijakan	Produk	Definisi Produk	Isi Produk
1	Perumusan Masalah (<i>Problem Structuring</i>)	1. Kajian Kebijakan	Kajian kebijakan adalah telaah untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul dari sisi politik nasional dan global.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan problem politik yang muncul dari kebijakan di level nasional dan global 2. Pemetaan aktor yang memiliki kepentingan atas persoalan di level nasional dan global 3. Pemetaan ideologi dan nilai aktor di level nasional dan global 4. Pemetaan sumberdaya aktor di level nasional dan global
		2. Naskah kebijakan	Naskah kebijakan adalah hasil pekerjaan analisis yang memberikan kajian permasalahan kebijakan yang komprehensif mulai dari aspek teknis, organisasional dan aspek politis nasional dan global.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian permasalahan kebijakan baik dalam konteks politik nasional dan politik global; 2. Kesimpulan dari kajian permasalahan kebijakan yang bersifat politis dalam level nasional dan global.
2	Peramalan (<i>Forecasting</i>)	Konjektur Kebijakan	Konjektur kebijakan adalah hasil konklusi mengenai prediksi kebijakan yang dibuat berdasarkan data statistik, lingkungan politik nasional dan politik global.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian mengenai prediksi kebijakan dengan menganalisa lingkungan politik nasional dan global; 2. Skenario kebijakan yang dibuat berdasarkan data statistik dan hasil analisis politik nasional serta politik global.
3	Perekomendasi (<i>Recommendation</i>)	Beleid Kebijakan	Beleid kebijakan adalah kajian mengenai alternatif kebijakan yang dibuat berdasarkan data statistik, kajian lingkungan politik nasional dan situasi politik global.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian mengenai alternatif terpilih dalam konteks nasional dan global.
4	Pengamatan (<i>Monitoring</i>)	Tinjauan Strategis Kebijakan	Tinjauan strategis kebijakan adalah kajian mengenai permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian mengenai kebijakan yang diobservasi dalam

No	Prosedur Analisis Kebijakan	Produk	Definisi Produk	Isi Produk
			dalam pengimplementasian sebuah kebijakan berdasarkan data statistik, situasi politik nasional dan situasi politik global.	<ul style="list-style-type: none"> konfigurasi politik nasional dan global; 2. Kajian mengenai keluaran kebijakan yang diobservasi dalam konfigurasi politik nasional dan global; 3. Kajian mengenai pelaksanaan kebijakan dalam konfigurasi politik nasional dan global; 4. Kajian ada tidaknya kesenjangan antara tujuan dan keluaran dengan melihat lingkungan politik nasional dan global; 5. Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kesenjangan antara tujuan dan keluaran dalam konfigurasi politik nasional dan global.
5	Penilaian (<i>Evaluation</i>)	Penilaian Kebijakan	Penilaian kebijakan adalah kajian mengenai hubungan sebab akibat antar variabel yang mempengaruhi derajat efektivitas kebijakan berdasarkan data statistik, kajian situasi politik nasional dan global serta solusi permasalahan kebijakan jangka panjang yang memprioritaskan kepentingan bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kajian kebijakan yang dievaluasi dalam konfigurasi politik nasional dan global; 2. Kajian hasil kebijakan dalam konfigurasi politik nasional dan global; 3. Kajian pelaksanaan kebijakan dalam konfigurasi politik nasional dan global; 4. Kajian ada tidaknya kesenjangan antara tujuan dan hasil kebijakan dalam konfigurasi politik nasional dan global; 5. Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara tujuan dan hasil kebijakan dalam konfigurasi politik nasional dan global. 6. Rekomendasi berdasarkan hasil

No	Prosedur Analisis Kebijakan	Produk	Definisi Produk	Isi Produk
				evaluasi kebijakan.

3.3.2 Produk Analisis Kebijakan Penunjang

3.4. Penilaian Angka Kredit

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. (1981). Policy Analysis Grade-Evaluation Guide. US Office of Personnel Management.
- Dunn, W. N. (1981). An introduction to public policy analysis. Englewood Clifls.
- Dunn, WN. (2004). Public Policy Analysis : An Introduction. Pearson-Prentice Hall, New Jersey.
- Forester, J. (Ed.). (1993). The argumentative turn in policy analysis and planning. Duke University Press.
- Friedrich, C. J. (2007). Public Policy. Style Press.
- Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, (Oxford: Oxford University Press, 1995), cet. ke-5
- Kay, A. (2006). The dynamics of public policy: Theory and evidence. Edward Elgar Publishing.
- Lester, J. P., & Stewart, J. (1996). Public Policy: An Evolution Approach.
- Meltsner, A. J. (1972). "Political Feasibility and Policy Analysis." Public Administration Review , Vol. 32, No. 6 (Nov. - Dec., 1972), pp. 859-867
- (1976). Policy analysis in the bureaucracy. University of California Pr.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (Eds.). (2003). Handbook of public administration. Sage.
- Sharkansky, I. (1970). Policy analysis in political science. Markham Pub. Co.
- Ukeles, J. B. (1977). "Policy Analysis : Myth or Reality?". Public Administration Review, 37(3), 223-228.
- Viteritti, JP. (1982). "Policy Analysis in the Bureaucracy : An Ad Hoc Approach," Public Administration Review, Vol. 42 No. 5 (Sep. – Oct. 1982), 466-474.

Media Online

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

<http://www.tempo.co/read/news/2012>

<http://www.jurnas.com/news/32485>

<http://hukumonline.com>